

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini Jepang sudah diakui sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia. Tentunya kemajuan ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu Negeri Sakura tersebut, terutama peristiwa Restorasi Meiji yang menjadi awal dari keterbukaan Jepang terhadap dunia luar, dalam hal ini menjalin hubungan dengan bangsa lain, khususnya bangsa Barat. Restorasi Meiji juga merupakan awal dari titik balik bangsa Jepang setelah melewati periode Edo yang kelam.

Pada tahun 1603, Tokugawa Ieyasu yang berhasil memantapkan kekuasaannya di seluruh Negara Jepang, membangun pemerintahan berbasis militer dengan berpusat di Edo (*Edo Bakufu*), yang saat ini dikenal dengan nama Tokyo. Zaman Edo merupakan zaman yang dipimpin oleh klan Tokugawa selama kurang lebih 250 tahun.

Pada periode Edo Bakufu, hampir segala aspek diatur oleh pemerintah. Pemerintah membuat banyak sekali kebijakan yang bersifat mengikat rakyatnya. Salah satu kebijakan yang terkenal di zaman Edo adalah kebijakan politik *Sakoku*, yaitu kebijakan luar negeri yang dibuat pemerintahan Tokugawa yang mengatur orang Jepang untuk tidak keluar batas wilayah, begitupun orang dari luar Jepang dilarang memasuki wilayah Jepang, kecuali bangsa Portugis dan Belanda. Kebijakan ini berhasil membuat Jepang mengembangkan budaya khas Jepang yang tidak dapat diadaptasi dari negara lain, namun di sisi lain Negara Jepang telah jauh tertinggal dengan bangsa Barat.

Selain kebijakan luar negeri, kehidupan masyarakat Jepang pada pemerintahan Tokugawa juga diatur oleh pemerintah, yaitu dengan sistem *shinokosho*. *Shinokosho* adalah pembagian kelas masyarakat Jepang menjadi empat bagian, yaitu *bushi* (samurai/bangsawan), *nomin* (petani), *kosakumin* (pengrajin), dan *shomin* (pedagang). Tujuan Edo Bakufu menetapkan kebijakan *shinokosho* agar kaum bushi tetap mendapat kedudukan istimewa dan menjaga stabilitas pemerintahan feodal Tokugawa. Selain sistem *shinokosho*, zaman

pemerintahan Tokugawa juga mengharuskan bahwa seseorang harus menghormati orang yang lebih tua, laki-laki, dan atasan. Kondisi tersebut disebabkan karena kuatnya pengaruh Konfusianisme saat itu (Tomoko, 1999). Ajaran Konfusianisme menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pengaruh Konfusianisme semakin kuat dengan adanya politik *sakoku* yang melarang ajaran Kristen masuk ke Jepang.

Dampak lain dari kuatnya pengaruh Konfusianisme bisa dilihat dari adanya sistem *ie* yang diberlakukan dalam kehidupan keluarga di Jepang, khususnya bagi kaum *bushi*. Sistem *ie* mengikuti garis keturunan patrilineal (keturunan ayah), di mana sistem nilai dan norma masyarakat Jepang menempatkan wanita pada posisi di bawah laki-laki. Ini menyebabkan wanita selalu dianggap inferior, rendah, tidak sekuat, dan sepintar pria (Sembung, 2013). Kedudukan wanita juga dapat dilihat dari penulisan kanji *onna* (女) yang ditulis dengan makna yang negatif, seperti pemerkosaan (奴隷) dan perbudakan (姦する) (japantimes.co.jp, diakses pada 21 januari 2018).

Sistem *ie* pada awalnya hanya berlaku di kalangan *bushi*. *Bushi* adalah salah satu golongan penting dalam lapisan masyarakat pada masa *Bakufu Edo*. Dalam sistem *ie*, seorang ayah memegang peranan penting. Ayah dalam sistem keluarga Jepang ini disebut *Kachou*. *Kachou* merupakan kepala keluarga, yang dalam sistem ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sementara anggota keluarga yang lain berada di bawahnya dan harus tunduk pada keputusan kepala keluarga. Dalam hal ini, wanita kembali menjadi nomor dua karena ia harus menuruti keputusan suami dan anak lelakinya (Fukutake, 1989).

Dengan sistem yang mengekang masyarakat seperti ini, tanpa mereka sadari ilmu pengetahuan dan teknologi di luar Jepang sudah sangat maju. Oleh sebab itu Restorasi Meiji merupakan sebuah peristiwa yang telah mengubah negara Jepang, baik segi ekonomi, politik, maupun masyarakat. Meski demikian, pandangan orang Jepang terhadap perempuan tidak banyak berubah.

Pasca restorasi, Jepang menjadi Negara pertama di luar bangsa Barat yang berhasil mengelola industri modern. Dalam proses Industrialisasi Jepang pada era Meiji (1868-1912), terdapat komoditi yang paling esensial, yaitu katun dan sutra

yang merupakan sektor industri ringan. Selama periode 1877-1900, lebih dari dua per tiga dari perkembangan industri manufaktur pada abad ke-19 merupakan kontribusi dari industri ringan, salah satunya yaitu industri tekstil yang berhasil mengisi 35 persen dari komoditi industri ringan tersebut (Sembung, 2013).

Kemajuan sektor industri tekstil tidak lepas dari banyaknya pekerja di pabrik-pabrik tekstil. Para pekerja tersebut kebanyakan adalah perempuan-perempuan dari pedesaan yang direkrut oleh pengelola pabrik. Pengelola pabrik lebih memilih untuk merekrut perempuan yang berasal dari pedesaan karena kehidupan di pedesaan yang tergolong sulit. Mayoritas penduduk yang bekerja sebagai buruh tani kebanyakan tidak memiliki lahan sehingga harus menyewa kepada tuan tanah. Dengan iming-iming diberi upah yang tinggi dan tinggal di asrama yang “nyaman”, buruh-buruh tani tersebut dapat dengan mudah direkrut oleh pengelola pabrik. Selain diimingi dengan upah dan kehidupan yang layak, para perempuan tersebut juga didoktrin oleh pengelola pabrik bahwa dengan mereka bekerja di pabrik tekstil tersebut, maka mereka telah dianggap berbakti kepada keluarga dengan membantu perekonomian dan berbakti kepada negara. (Fukutake,1989). Dalam Konfusianisme, seorang wanita hanya diperbolehkan bekerja di rumah mengurus kelangsungan rumah tangga mereka. Prinsip ini masih dipegang teguh oleh kaum bangsawan di kota sehingga perempuan-perempuan di sana tidak diperbolehkan menjadi buruh pabrik.

Selama era Meiji, jumlah buruh industri meningkat dengan pesat. Sekitar tahun 1880, hanya sekitar 20 persen dari penduduk produktif yang bekerja sebagai buruh tani. Sejak tahun 1902, jumlah buruh industri meningkat menjadi 24,6 juta jiwa dan sekitar 78 hingga 80 persen di antaranya pernah bekerja sebagai buruh tani. Kurang lebih 499.000 dari total buruh yang berhasil direkrut tersebut bekerja di sektor industri dan sekitar 269.000 dari jumlah tersebut merupakan pekerja industri tekstil, yang umumnya bekerja di pabrik sutra dan katun. Sepuluh tahun kemudian, jumlah tenaga kerja industri meningkat menjadi sekitar 863.000 orang, lebih dari setengahnya bekerja di bidang tekstil yang didominasi oleh buruh wanita (Tsurumi, 1990).

Di balik kemunculan banyaknya lapangan pekerjaan baru bagi kaum perempuan, kondisi perempuan yang bekerja di pabrik tekstil ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Para perempuan tersebut dipaksa bekerja dari pagi hingga larut malam. Mereka termakan oleh janji-janji manis para pengelola pabrik. Biasanya, para wanita Jepang yang bekerja di sektor industri berusia di bawah 20 tahun, dan belum menikah. Kebanyakan dari mereka tinggal di asrama yang disediakan pabrik. Asrama tersebut pun tidak ditunjang dengan fasilitas yang layak. Belum lagi mereka harus bekerja hingga melewati batas kerja mereka, bahkan nyaris tidak ada libur atau cuti dari pekerjaan mereka (Tsurumi,1990).

Jepang sudah memasuki masa di mana negara tersebut mulai menyerap kebudayaan Barat, namun pandangan orang Jepang terhadap perempuan tidak banyak berubah. Meskipun di zaman Meiji terjadi restrukturisasi masyarakat Jepang hingga terbentuk *shiminbyodo* (penyetaraan empat strata dalam *shinokosho*), namun wanita masih hanya dipandang sebelah mata dan kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi. Dominasi pekerja perempuan di sektor industri tekstil tidak menjanjikan mereka mendapat perlakuan baik dari pengelola pabrik. Mereka dipaksa bekerja dari pagi hingga malam di pabrik dan tinggal di asrama yang tidak layak huni. Bagian terburuknya adalah meskipun jam kerja mereka sama dengan pekerja laki-laki, upah mereka hanya mencapai separuh dari upah pekerja laki-laki. Oleh sebab itu, penulis ingin menganalisis penyebab wanita kerap mengalami eksploitasi dan diskriminasi di pabrik industri tekstil.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah berikut :

1. Kehidupan masyarakat sangat terikat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintahan Tokugawa.
2. Kuatnya pengaruh Konfusianisme di Jepang pada zaman Edo mengakibatkan kaum perempuan dianggap lebih rendah ketimbang laki-laki.

3. Kemajuan teknologi industri di Jepang pada zaman Meiji menyebabkan masyarakat beralih profesi yang semula buruh tani menjadi buruh industri.
4. Perempuan Jepang juga direkrut menjadi pekerja pabrik industri, khususnya industri tekstil sebagai akibat dari banyaknya kebutuhan tenaga kerja.
5. Perempuan yang bekerja di pabrik industri tekstil mengalami eksploitasi dan diskriminasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis akan membatasi permasalahan menjadi eksploitasi dan diskriminasi wanita di pabrik industri tekstil periode Meiji

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah dan pembatasan masalah di atas, maka penulis dapat membuat sebuah rumusan dari masalah-masalah di atas, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan wanita di Jepang dari Periode Edo hingga Periode Meiji?
2. Mengapa eksploitasi dan diskriminasi di pabrik industri tekstil cenderung terjadi pada wanita?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

1. Mengetahui kedudukan wanita di Jepang dari awal pembentukan masyarakat Jepang hingga periode Meiji
2. Mengetahui penyebab eksploitasi dan diskriminasi di pabrik industri tekstil yang cenderung terjadi pada wanita

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai eksploitasi diskriminasi wanita Jepang di sektor industri tekstil.

2. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang.

1.7 Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan dalam proses penelitian. Dalam arti kata sesungguhnya, metode (Yunani = *methodes*) adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Sayuti, 1989:32).

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu dengan penguraian dan penggambaran terkait pokok permasalahan. Penulis akan menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan serta menganalisis data. Studi pustaka dilakukan dengan cara menilai sumber yang didapat melalui buku, jurnal, artikel, maupun majalah yang berhubungan dengan penelitian. Penulis juga tidak luput dari penggunaan internet untuk mengumpulkan data, seperti e-jurnal dan artikel bersifat *online*.

1.8 Landasan Teori

1. Eksploitasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Tindakan eksploitasi tenaga kerja mengacu kepada situasi yang menyimpang secara signifikan dari kondisi kerja standar seperti yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum mengikat lainnya, khususnya menyangkut jam kerja, hak pekerja, standar kesehatan dan keselamatan dan perlakuan yang layak (FRA, diakses 1 Agustus 2018).

Tindakan eksploitasi dilakukan dengan pertimbangan ekonomi tanpa memikirkan pertimbangan lainnya sehingga dapat merugikan orang lain. Karl

Marx mengungkapkan bahwa eksploitasi tenaga kerja adalah pemberian imbalan yang tidak wajar kepada pekerja di mana jumlahnya kurang dari jumlah total produksi setelah dikurangi dengan biaya pemeliharaan barang-barang modal.

Eksplorasi terjadi sebagai dampak dari industrialisasi yang menyebabkan terjadinya perdagangan kapitalisme. Pada dasarnya semua orang memiliki kebebasan untuk berdagang, namun dalam kondisi ini, hanya para pemilik modal atau kaum borjuis yang dapat bersaing. Dalam menjalankan bisnis membutuhkan modal, sehingga kaum pekerja harus bekerja pada kaum borjuis. Dalam proses produksi inilah, kaum borjuis sering memeras tenaga para pekerja dan membayar mereka dengan upah rendah. Hal tersebut dilakukan agar para pemilik modal tersebut dapat meraup untung sebesar-besarnya dengan modal seminim mungkin.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa eksploitasi merupakan tindakan pemanfaatan suatu sumber daya untuk kepentingan diri sendiri tanpa mempertimbangkan dampak terhadap objek eksploitasi. Dalam konteks tenaga kerja, eksploitasi diartikan sebagai pemanfaatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan upah dan menyimpang dari standar kondisi kerja, seperti bekerja di luar batas waktu yang telah ditentukan.

2. **Diskriminasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap orang lain. Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut.

Kata diskriminasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *discriminatio*, yang artinya “merasakan perbedaan di antara fenomena atau menjadi selektif dalam penilaian seseorang”. “Definisi diskriminasi secara sosiologi yang terluas adalah anggapan bahwa ras, perempuan, dan sasaran historis lainnya tidak memiliki karakteristik yang melekat dan menyebabkan inferior sosial” (Borgatta,1992).

Menurut Pasal 1 Perjanjian Serikat Buruh Internasional (ILO) No. 11 Tahun 1958, tindakan diskriminasi mencakup perbedaan perilaku yang dibuat berdasarkan ras, warna (kulit), jenis kelamin, agama, pendapat politik, suku bangsa, atau keturunan, yang dapat merusak kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan atau perawatan di lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan (ILO, diakses 31 Juli 2018).

Pettigrew berpendapat bahwa sosiolog membedakan diskriminasi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

“Direct discrimination occurs at point where inequality is generated, often intentionally. When decisions are based explicitly on race, discrimination is direct. Indirect discrimination is perpetuation or magnification of the original injury. It occurs when inequitable results of direct discrimination are used as a basis for later decisions or decisions on linked institutions. In other words, discrimination is indirect when a ostensibly nonracial criterion serves as a proxy for race in determining social outcomes (Borgatta, 1992:499).”

★ Terjemahan.

Diskriminasi langsung terjadi pada titik di mana ketidaksetaraan dihasilkan, seringkali dengan sengaja. ketika keputusan berdasarkan pada ras, diskriminasi bersifat langsung. Diskriminasi tidak langsung adalah pengabdian atau pembesaran dari derita emosional. itu terjadi ketika ketidakadilan dari diskriminasi langsung digunakan sebagai dasar untuk keputusan kemudian, atau keputusan pada lembaga terkait. Dengan kata lain, diskriminasi adalah tidak langsung ketika sebuah kriteria yang seolah-olah non rasial berfungsi sebagai wakil ras dalam menentukan hasil-hasil sosial.

Diskriminasi dapat berawal dari prasangka terhadap orang lain. Dari prasangka kita menganggap orang lain berbeda dengan kita. Pada dasarnya orang cenderung ingin berkumpul atau melakukan interaksi sosial dengan orang lain yang memiliki kesamaan dengan kita. Prasangka dapat terjadi karena kesalahpahaman atau ketakutan akan perbedaan orang yang berada di luar kelompoknya. Prasangka makin diperburuk dengan adanya setereotip

yang cenderung ke arah negatif. Diskriminasi terjadi ketika prasangka dan stereotip tersebut berubah menjadi aksi (Bina Nusantara, n.d)

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa diskriminasi adalah perlakuan membeda-bedakan orang lain berdasarkan hal-hal tertentu, seperti jenis kelamin, suku, agama, dan warna kulit.

3. **Industrialisasi**

Industrialisasi berasal dari kata industri yang memiliki makna kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, melalui mesin. Jadi industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris (pertanian) menjadi masyarakat industri (Departemen Pendidikan Nasional, 2010).

Industrialisasi adalah proses percepatan pertumbuhan produksi barang industri yang dilaksanakan di dalam negeri, yang diimbangi dengan pertumbuhan yang serupa di bidang permintaannya, yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Industrialisasi akan terhambat apabila aspek produksinya atau aspek permintaannya terhambat pertumbuhannya (Roosiani, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa industrialisasi adalah proses perubahan sosial dan ekonomi yang mengubah sistem pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, yang diiringi dengan pertumbuhan produksi dan permintaan barang industri di dalam negeri.

4. **Sistem Ie**

Dalam bahasa Jepang kata Ie mempunyai dua arti yaitu Ie sebagai bangunan rumah dan Ie sebagai suatu sistem *limited extended family* (keluarga luas terbatas) yang dihitung secara patrilineal. Menurut Chie Nakane (dalam Unikom, n.d), pengertian Ie adalah sebagai berikut :

“「家」は一定の条件に支えられて、形成された日本文化特有の制度であるということである。”

Terjemahan:

“*Ie*” adalah satu sistem yang khas dari kebudayaan Jepang yang terbentuk dengan ditunjang oleh syarat-syarat tertentu (1978:3)”. Dan:

“「家」制度というものが... 他の国々見られず日本においてのみ非常に発達した制度であるといふことは「家」は日本に固有な文化をあらわしているものといえよう。”

Terjemahan:

Sistem “*Ie*” di Jepang.....

merupakan suatu sistem keluarga yang tidak dapat ditemukan di negara lain, kecuali di Jepang, sistem yang berkembang ini hanya ada di Jepang karena sistem ini merupakan perwujudan kebudayaan khas Jepang (1978:8).

Idealnya kehidupan bersama dalam sistem *Ie* terdiri dari kumpulan beberapa keluarga inti dengan satu keluarga inti senior yang juga berfungsi sebagai *kachou* yakni kepala keluarga luas yang disebut *Ie* tersebut. Mereka hidup bersama secara turun-temurun dan berkesinambungan, serta terikat oleh satu garis keturunan yang dihitung secara patrilineal.

— *Ie* akan berlangsung terus-menerus meskipun keanggotaannya selalu mengalami pergantian dari masa kemasa. Status dari anggota pembentuk *Ie* walaupun berpangkal dari adanya ikatan suami-istri, namun bukanlah semata-mata berdasarkan garis keturunan darah, melainkan dapat pula ditentukan oleh hubungan yang bersifat keagamaan seperti pemujaan leluhur, hubungan ekonomi, hukum, moral, budaya dan sebagainya. Pakar sosiologi pedesaan, Aruga, menegaskan bahwa *Ie* dapat terbentuk tidak hanya oleh penerus utama (biasanya *chouan* atau anak laki-laki tertua) tetapi juga bisa terbentuk oleh kaum kerabat yang bukan penerus utama, seperti *jinan* (anak laki-laki kedua), *sannan* (anak laki-laki ketiga), dan seterusnya. Bahkan orang yang bukan keturunan langsung pun, seperti *yoshi* (anak angkat), menantu penerus nama keluarga, dan para pembantu keluarga bisa saja meneruskan kesinambungan *Ie* asalkan mereka

memiliki loyalitas yang tinggi terhadap eksistensi Ie tersebut sebagai satuan kehidupan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa sistem Ie adalah sistem kekeluargaan tradisional khas Jepang berdasarkan garis keturunan ayah. Sistem Ie dipimpin oleh seorang kepala keluarga dan dalam satu sistem Ie biasanya terdapat dua hingga tiga keluarga. Keanggotaan Sistem Ie tidak hanya berdasarkan pada keturunan darah, tapi orang yang tidak memiliki hubungan darah pun dapat melanjutkan kelangsungan sistem Ie selama mereka memiliki loyalitas tinggi terhadap keberadaan sistem Ie tersebut.

1.9 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disajikan dalam empat bab secara sistematis sebagai berikut :

Bab I, Merupakan pendahuluan skripsi yang tersusun atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, dan sistematika penulisan.

Bab II, Pada bab ini, penulis akan membahas kedudukan wanita di Jepang dari sebelum masa feodal hingga periode Meiji.

Bab III, Pada bab ini, penulis akan membahas eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di sektor industri tekstil Jepang pada periode Meiji

Bab IV, Merupakan kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.